



**PEMERINTAH
PROVINSI BALI**



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI**

KATA PENGANTAR

"OM SWASTYASTU"

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas *Asung Kerta Wara Nugraha-Nya*, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renja merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maksud disusunnya Renja yakni dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dan bertahap, mengacu *core business* Perangkat Daerah dan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan. Sedangkan tujuan disusunnya Renja yakni untuk menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024 dalam upaya memperkuat kedudukan Tugas dan Fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan Kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* dan mewujudkan *Kasukretan* Desa Adat. Renja ini juga dapat memberikan panduan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali Tahun 2024.

Demikian disampaikan terima kasih.

"OM SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM"

Bali, 4 Agustus 2023

KEPALA DINAS,


I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.2 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2021..... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali 13

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali 17

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT ROVINSI BALI 28

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 28

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali 30

3.3 Program dan Kegiatan..... 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2024..... 39

BAB V PENUTUP..... 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja 7

Tabel 2.2 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)* Provinsi Bali 9

Tabel 2.3 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali..... 14

Tabel 2.4 : Rancangan Akhir Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 18

Tabel 2.5 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Provinsi Bali 24

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 31

Tabel 3.2 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan maju Tahun 2025 Provinsi Bali 33

Tabel 4.1 : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan masing-masing Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebagai Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun perencanaan baik yang bersifat jangka menengah 5 (lima) Tahun Renja maupun tahunan. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebagai perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat.

Dalam Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat atau disebut dengan Desa *Mawacara*. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya dari para Leluhur/Tetua Bali. Bali dan *Kramanya* memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang sangat tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Tata kehidupan *Krama* Bali dengan kebudayaan tinggi tersebut diwadahi dalam Desa Adat. Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya. Tata kehidupan *Krama* Bali yang khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang *metaksu*.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2024 didasari oleh beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 No 3, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

- 22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman , Mekanisme, dan Pendirian *Bhaga Utsaha Padruwen* Desa Adat (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- 23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 34);
- 24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4);
- 25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
- 26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
- 27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud dari penyusunan Renja in, yaitu:
 - a. Sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dan bertahap, mengacu *core business* SKPD; dan
 - b. Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
- 2. Tujuan dari penyusunan Renja ini, yaitu:
 - a. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024; dan
 - b. Memberikan panduan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan mengenai proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

- Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022,** Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting yaitu memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan Review terhadap Rancangan RKPD.
- Bab III Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat,** Dalam bab ini memuat tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Daerah serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya Penguatan dan Pemberdayaan Adat di Provinsi Bali.
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2024,** Dalam bab ini diuraikan mengenai pagu anggaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024. Pengalokasian pagu anggaran masing program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu program prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024.
- Bab V Penutup**
Lampiran-lampiran.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 dan Capaian Renstra Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

A. Instrumen Evaluasi terhadap Hasil Renja

Instrumen yang digunakan untuk pengendalian dan evaluasi Renja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen realisasi fisik dan keuangan triwulan IV Tahun 2022 dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan. Skala nilai peringkat kinerja dengan menggunakan kriteria dalam Tabel 2.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1. Hasil sangat tinggi dan tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2. Hasil sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3. Hasil rendah dan sangat rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

B. Capaian Target Kinerja

Pada tahun 2022 jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk mendukung prioritas Pembangunan Bali Bidang 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya yaitu dengan 2 program, 10 kegiatan, dan 17 sub kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran strategis dilaksanakan melalui proses analisis data dan informasi secara sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, kondisi dan tingkat capaian terhadap perjanjian kinerja yang ditetapkan antara Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur Bali dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Rata-rata realisasi capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 sebesar 100% dengan katagori “tinggi” selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
 Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
 Tahun 2023 (tahun berjalan)* Provinsi Bali

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
2	22				Bidang Urusan Kebudayaan									
2	22	01			Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	80,39	80,39	80.39	100	80,80	80,50	100%
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	100%	6	6	100%
2	22	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran (output) : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%

2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	54	54	54	100%	52	52	100 %
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100 %	1	1	100 %
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	1	1	1	100 %	1	1	100 %
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	720	459	459	459	100%	720	508	100 %
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	37	37	37	100 %	125	125	100%
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	15	15	15	100%	15	15	100 %
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	36	36	100%	36	36	36	100 %
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	6	6	100%	6	6	6	100 %
2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	12	100%	12	12	12	100 %
2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Indeks Membangun Desa Adat	0,8750	0,6909	0,6910	0,6910	100%	0,7090	0,6975	100 %
2	22	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola Pemerintahannya Baik	94,98%	46,55%	75,00%	78,43%	104,58%	81,71 %	79,37%	100%
2	22	09	8.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pemerintahannya	1.493	1.491	1.493	1.493	100%	1.493	1.493	100 %
2	22	09	8.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	jumlah produk hukum desa adat	1.493	1.493	1.493	1.493	100 %	1.493	1.493	100 %
2	22	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	14,53%	0,27%	3,82%	4,09%	106,96%	10,05 %	8,04%	100 %
2	22	09	8.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya	200	200	200	100	200	15	29	50,87%

2	22	09	8.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya	50	15	15	100	15	20	50	87,71%
2	22	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	82,78 %	73,01%	77,03%	78,16%	100 %	81,38 %	79,37 %	100 %
2	22	09	8.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	4	4	4	100	4	4	4	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Dalam upaya mendukung kinerja yang ditetapkan dalam sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yaitu Terwujudnya Kasukretan Desa Adat. Capaian kinerja Kasukretan Desa Adat ini diukur dari semakin meningkatnya kemandirian Desa Adat dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali. Terwujudnya Kasukretan Desa Adat difokuskan pada meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat, meningkatnya kualitas Perekonomian Desa Adat, meningkatnya kualitas Hukum Adat, serta meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

NO	Indikator Sasaran	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019 (tahun n-3)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2019 (tahun n-3)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1.	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	-	-	-	6,70	8,57	12,06	15,07	-	7,03	7,97%	13,86	14,00	
2.	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	-	-	75	80	82	83	-	N/A	80,39	80,39	80,50	
3.	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	-	-	-	25,11	30,14	31,81	33,49	-	29,87	46,55 %	78,43	79,37	
4.	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	-	-	-	0,05	9,18	14,53	20,09	-	0,07	0,27 %	4,09	8,04	
5.	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	-	-	-	60,28	94,44	94,77	95,44	-	93,84	93,84 %	94,84	95,11	
6.	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	-	-	-	70,33	75,02	77,03	80,37	-	73,01	73,01 %	78,16	79,37	
7.	Indeks Membangun Desa Adat	-	-	-	0,6825	0,6850	0,6863	0,6975	-	0,6875	0,6909	0,6910	0,6975	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat dan belum mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 yaitu Kapasitas Prajuru Desa Adat Dalam Pemerintahan Desa Adat Belum Optimal
2. Tata Kelola Perekonomian Desa Adat belum Optimal:
 - a. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadinya penurunan jumlah LPD dengan kriteria sehat, pada tahun 2016 sebesar 67,06% dimana tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 50,35% dan pada tahun 2021 terjadi penurunan lagi menjadi 42% dan Tahun 2022 naik menjadi 44%;
 - b. Beberapa Desa Adat sudah membentuk Unit Usaha Sektor Riil atau Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA); dan
 - c. Masih minimnya Desa Adat yang mengadakan kerjasama dibidang Perekonomian Desa Adat.
3. Pemajuan Hukum Adat (Awig-Awig dan Pararem) belum sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, yaitu belum optimalnya pelaksanaan pendaftaran/registrasi Awig-Awig dan Pararem Desa Adat. Pada Tahun 2021 Produk Hukum Adat yang diregistrasi sebanyak 363, terdiri dari 362 Pararem dan 1 Awig-Awig dan pada tahun 2022 produk Hukum Adat yang diregistrasi sebanyak 294, terdiri dari 280 Pararem dan 14 Awig-Awig.
4. Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa Adat belum berjalan Optimal yaitu:
 - a. Belum selarasnya antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Desa Adat;
 - b. Belum tersedianya data dan informasi yang memadai tentang pembangunan baga parahyangan, palemahan, dan pawongan; dan
 - c. Belum optimalnya proses perencanaan, penataan kawasan, pelaksanaan pembangunan di Desa Adat.
5. Isu-isu terkait Subak :
 - a. Belum terdatanya Subak dan Subak Abian secara optimal, dan belum sinkronnya jumlah data Subak dan Subak Abian antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi; dan
 - b. Alih fungsi lahan, jumlah lahan berkurang tetapi jumlah Subak selalu berkembang.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali.

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Bali perlu adanya penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan antara dokumen RKPD Provinsi Bali dengan Renja Perangkat daerah. Dari hasil review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024, didapat bahwa jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan antara Rancangan RKPD Provinsi Bali dengan Renja Dinas Pemajuan masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu sebanyak 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.489.879.599.481,- (empat ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sepuluh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rancangan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
 Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								489.879.599.481			494.435.831.060		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								489.879.599.481			494.435.831.060		
2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI								473.125.996.134			477.289.581.060		
2	22	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat								471.579.070.704			475.589.581.060		
2	22	09	8.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	600 Desa	81,71	470.719.440.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,8050	474.714.581.060
2	22	09	8.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	300 Dokumen	81,71	859.630.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,8050	875.000.000

2	22	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat								941.436.538					1.050.000.000	
2	22	09	8.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaa n Perekonomiannya	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	200 Desa	10,05	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,8050	450.000.000	
2	22	09	8.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaa n Perekonomiannya	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	50 Desa	10,05	541.436.538	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,8050	600.000.000	
2	22	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat								605.488.892					650.000.000	
2	22	09	8.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	4 Laporan	81,38	605.488.892	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,8050	650.000.000	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								16.753.603.347					17.546.250.000	
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								35.750.000					37.000.000	

2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,80	6 Dokumen	100%	25.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0,8050	26.000.000
2	22	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,80	1 Laporan	100%	10.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0,8050	11.000.000
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.874.905.827				11.500.000.000	
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Denpasar	80,80	52 Orang/ Bulan	100%	10.874.905.827	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0,8050	11.500.000.000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								650.691.900					659.250.000

2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentas e tersediany a pelayanan Administra si Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,80	1 Paket	100%	6.432.900	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	6.750.000
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediakan	Persentas e tersediany a pelayanan Administra si Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,80	1 Paket	100%	34.303.800	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	35.500.000
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	Persentas e tersediany a pelayanan Administra si Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,80	720 Dokume n	100%	16.438.200	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	17.000.000
2	22	01	1.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyeleng garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentas e tersediany a pelayanan Administra si Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,80	125 Laporan	100%	593.517.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	600.000.000
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.270.505.000					1.300.000.000

2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik	Denpasar	80,80	15 Unit	0,00	1.270.505.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	1.300.000.000,00
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								319.611.980				350.000.000	
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	80,80	36 Laporan	100%	319.611.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	350.000.000
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.602.138.640				3.700.000.000	
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Denpasar	80,80	6 Unit	100%	854.668.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	900.000.000

2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Denpasar	80,80	12 Unit	100%	2.747.469.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	2.800.000.000
TOTAL													489.879.599.481					494.835.831.060

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penguatan dan pemberdayaan Desa Adat di Provinsi Bali dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah Rancangan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2024 dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 bertempat di Ruang rapat kantor Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Forum Perangkat Daerah ini melibatkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Adat, Majelis Desa Adat, Kelompok Ahli, lembaga adat, maupun dari Perangkat Daerah Provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait. Jumlah usulan program dan kegiatan dari peserta Forum adalah sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 17 Sub Kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Bali

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
				Target Tahun n	Target Tahun n+1	Target Tahun n	Target Tahun n+1
I	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali		Indeks Membangun Desa Adat	0.7090	0.8025	473,125,996,134	477,289,581,060
	1	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah Kelembagaan Desa Adat dibina	600 Desa Adat	600 Desa Adat	471,579,070,704	475,589,581,060
			Hasil (outcome) : Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	81,71	85.06		
	1)	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah Desa Adat yang dibina pemerintahannya	300 Desa Adat	300 Desa Adat	470,719,440,160	474,714,581,060
	2)	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah Produk Hukum Desa Adat	300 Dokumen	300 Dokumen	859,630,544	875,000,000
	2	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	250 Adat	250 Adat	941,436,538	1,050,000,000
			Hasil (outcome) : Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	10,05	11.05		
	3)	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	200 Desa Adat	200 Desa adat	400,000,000	450,000,000

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
				Target Tahun n	Target Tahun n+1	Target Tahun n	Target Tahun n+1
	4)	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	50 Desa Adat	50 Desa Adat	541,436,538	600,000,000
3	Penyelenggaraan Desa Adat		Keluaran (output) : Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan	4 Laporan	4 Laporan	605,488,892	650,000,000
			Hasil (outcome) : Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	81,38	82,38		
	5)	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Keluaran (output) : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	4 Laporan	4 Laporan	605,488,892	650,000,000
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,80	80.85	16,753,603,347	17,546,250,000
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Keluaran (output) : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 dokumen	7 dokumen	35,750,000	37,000,000
			Hasil (outcome) : Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%		
	6)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran (output) : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	25,500,000	26,000,000
	7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran (output) : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10,250,000	11,000,000
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Keluaran (output) :Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Proses	52 Orang/ Bulan	52 Orang/ Bulan	10,874,905,827	11,500,000,000
			Hasil (outcome) : Persentase pelayanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%		
	8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran (output) : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	52 Orang/ Bulan	10,874,905,827	11,500,000,000

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana		
			Target Tahun n	Target Tahun n+1	Target Tahun n	Target Tahun n+1	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran (output) : Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses	847 unit	847 unit	650,691,900	659,250,000	
		Hasil (outcome) : Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
	10)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran (output) : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6,432,900	6,750,000
	11)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran (output) : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34,303,800	35,500,000
	12)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran (output) : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	720 Dokumen	16,438,200	17,000,000
	13)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran (output) : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	125 Laporan	593,517,000	600,000,000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran (output) : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai	15 Unit	15 Unit	1,270,505,000	1,300,000,000	
		Hasil (outcome) : Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik	100%	100%			
	14)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran (output) : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	1,270,505,000	1,300,000,000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran (output) : Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	36 Laporan	36 Laporan	319,611,980	350,000,000	
		Hasil (outcome) : Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
				Target Tahun n	Target Tahun n+1	Target Tahun n	Target Tahun n+1
	15)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran (output) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	319,611,980	350,000,000
9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran (output) : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	18 unit	18 unit	3,602,138,640	3,700,000,000
			Hasil (outcome) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	100%	100%		
	16)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran (output) : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	854,668,688	900,000,000
	17)	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran (output) : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	2,747,469,952	2,800,000,000
						489,879,599,481	494,435,831,060

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional berguna untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, saling mendukung dalam pencapaian kinerja antara Kementerian terkait, Dinas Pemaian Masyarakat Adat Provinsi Bali dan Dinas yang mengurus Adat dan *Subak* di Kabupaten/Kota se Bali. Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara. Program Prioritas Nasional dibidang Kebudayaan, salah satunya yakni meningkatkan pemaian dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan indikator indeks pembangunan kebudayaan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Program Pemaian Masyarakat Adat Bali merupakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan. Mengacu pada program prioritas nasional serta program dan urusan yang diemban, maka Rencana Kerja Dinas Pemaian Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 telah merumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Memperkuat Pemerintahan Desa Adat, yang difokuskan pada:
 - a. Mendorong pembentukan kelembagaan Pemerintahan Desa Adat yang mengacu pada regulasi;
 - b. Memperkuat dan memberdayakan SDM Desa Adat dalam manajemen pengelolaan Pemerintahan Desa Adat;
 - c. Memperkuat dan memberdayakan Lembaga Adat di Desa Adat sampai ketingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - d. Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal);
 - e. Memperkuat SDM Desa Adat dalam pengelolaan Keuangan Desa Adat; dan
 - f. Membangun dan mengembangkan pengelolaan Keuangan Desa Adat dengan berbasis IT yaitu menggunakan Aplikasi SIKUAT;

2. Memperkuat dan memberdayakan perekonomian Desa Adat, yang difokuskan pada:
 - a. Memperkuat dan memberdayakan Lembaga Keuangan (LPD) sebagai tempat mengembangkan perekonomian adat Bali;
 - b. Memperkuat dan memberdayakan BUPDA melalui sektor riil sebagai tempat mengembangkan perekonomian adat Bali;
 - c. Memperkuat dan memberdayakan SDM Desa Adat dalam pengelolaan BUPDA; dan
 - d. Memfasilitasi Kerjasama perekonomian Desa Adat.
3. Memperkuat Desa Adat dalam Pemajuan hukum Adat, yang difokuskan pada:
 - a. Memelihara, merevitalisasi, dan memperkuat Hukum Adat (*Awig-Awig* dan *Pararem*) di Desa Adat;
 - b. Membangun dan mengembangkan pelayanan Hukum Desa Adat dengan berbasis IT yaitu menggunakan Aplikasi JIDHAT; dan
 - c. Memper SDM Kertha Desa dalam penyelesaian Wicara adat;
4. Memantapkan pembangunan Desa Adat, yang difokuskan pada :
 - a. Memperkuat koordinasi dan penyelenggaraan Desa Adat dalam perlindungan terhadap Parahyangan dan aset Desa (milik/*padruwen* Desa); dan
 - b. Memperkuat koordinasi dan penyelenggaraan Desa Adat dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas pawongan dalam Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Desa Adat;
5. Memantapkan dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang difokuskan pada:
 - a. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan penguatan dan pemberdayaan Desa Adat, dengan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
 - b. Meningkatkan peran semua *stakeholder* dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Desa Adat; dan
 - c. Meningkatkan koordinasi dan kompetensi SDM Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024-2026 yang akan dicapai oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah: "TERWUJUDNYA KASUKRETAN DESA ADAT"

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja.
- 2. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa Adat;
- 3. Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat;
- 4. Meningkatnya kualitas hukum Adat;
- 5. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat;

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026
1	Terwujudnya Kasukretan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan kehidupan karma Bali	Nilai	13,86	14,06	16,74
2	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80,39	80,80	80,90
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Persentase (%)	78,43	81,71	94,98
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	Persentase (%)	4,09	10,05	14,53
5	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	Persentase (%)	94,84	95,45	96,12
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	Persentase (%)	78,16	81,38	82,78

3.3. Program dan Kegiatan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah tahun 2024 pada urusan bidang pemerintahan adat di Provinsi Bali telah ditetapkan program, Kegiatan, Sub kegiatan dan pagu indikatif. Program dan Kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat pada Tahun Anggaran 2024 adalah untuk mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Bidang 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana / pagu indikatif sebesar Rp. 482.218.721.241,- (empat ratus delapan puluh dua miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Bali

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								482.218.721.241		494.835.831.060			
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								482.218.721.241		494.835.831.060			
2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI								468.305.912.624		477.289.581.060			
2	22	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat								467.480.253.764		475.589.581.060			
2	22	09	8.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Indeks Membangu n Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintaha nnya	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahaany a baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	600 Desa	81,71	467.167.556.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangu n Desa Adat	0,8050	474.714.581.060
2	22	09	8.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Indeks Membangu n Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahaany a baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	300 Dokumen	81,71	312.697.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangu n Desa Adat	0,8050	875.000.000
2	22	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat								525.395.276		1.050.000.000			
2	22	09	8.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Indeks Membangu n Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomia nnya	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	200 Desa	10,05	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangu n Desa Adat	0,8050	450.000.000

2	22	09	8.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	50 Desa	10,05	375.395.276	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,8050	600.000.000
2	22	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat							300.263.584				650.000.000		
2	22	09	8.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	4 Laporan	81,38	300.263.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,8050	650.000.000
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							13.912.808.617				17.546.250.000		
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							23.224.800				37.000.000		
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,80	6 Dokumen	100%	18.160.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0,8050	26.000.000
2	22	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,80	1 Laporan	100%	5.064.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0,8050	11.000.000
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.875.000.785				11.500.000.000	
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Denpasar	80,80	52 Orang/Bulan	100%	10.875.000.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0,8050	11.500.000.000

2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								580.682.900					659.250.000
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,80	1 Paket	100%	6.432.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	6.750.000
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,80	1 Paket	100%	34.303.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	35.500.000
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,80	720 Dokumen	100%	16.438.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	17.000.000
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,80	125 Laporan	100%	523.508.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	600.000.000
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								95.918.000					1.300.000.000

2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik	Denpasar	80,80	15 Unit	0,00	95.918.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	1.300.000.000,00
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								305.778.300				350.000.000	
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	80,80	36 Laporan	100%	305.778.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	350.000.000
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.032.203.832				3.700.000.000	
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Denpasar	80,80	6 Unit	100%	603.139.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	900.000.000
2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Denpasar	80,80	12 Unit	100%	1.429.064.056	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	2.800.000.000
TOTAL													482.218.721.241					494.835.831.060

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
TAHUN 2024

Keberhasilan pencapaian pembangunan dalam memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam mewujudkan *kesukretan* Desa Adat di Provinsi Bali, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan pada rancangan Akhir Renja Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 yang bersumber dari APBD difokuskan kepada:

A. Kerangka pendanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat, melalui:

1. Pembinaan Pemerintahan Desa Adat, difokuskan pada:

- a. Sosialisasi dan Desiminasi Juknis Lembaga Pemerintahan Desa Adat;
- b. Pendataan dan Penataan Lembaga Pemerintahan Desa Adat;
- c. FGD Kerjasama Desa Adat;
- d. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Desa Adat;
- e. Sosialisasi Tipologi Desa Adat;
- f. Sosialisasi Pedoman *Ngadegang Bandesa* Adat atau sebutan lain dan *Prajuru* Desa Adat;
- g. Pengukuhan *Bandesa* Adat atau sebutan lain dan *Prajuru* Desa Adat sesuai dengan Perda nomor 4 Tahun 2019;
- h. Pembayaran Honorarium *Prajuru* Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
- i. Memantapkan kebijakan tata Kelola modern pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Adat sesuai Pergub Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
- j. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT);
- k. Pendampingan dan Verifikasi Proposal Dana Penguatan Desa Adat Tahun 2023;
- l. Pencairan 1.493 Dana Penguatan Desa Adat Tahun 2023;
- m. Pencairan Dana Percontohan Peningkatan Kapasitas SDM Adat di Perguruan Tinggi 2023;
- n. Penyusunan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa Adat Tahun 2024
- o. Bimtek pengelolaan keuangan Desa Adat;
- p. Fasilitasi Klinik Konsultasi pengelolaan tata kelola keuangan Desa Adat;
- q. Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa Adat;
- r. Pendampingan Pembentukan Pasraman Non Formal di Desa Adat;
- s. Bimtek Pasraman Non Formal;
- t. Pendataan, Pembentukan, dan Pembinaan Pasraman Non Formal di Desa Adat;
- u. Monetoring Pasraman Non Formal di Desa Adat ;
- v. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas *Pasikian/Paiketan* Lembaga Adat Tingkat Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan (PAKIS Bali, *Yowana* dan *Pacalang*;
- w. Sosialisasi Lembaga Adat melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online;

- x. Rakor PAKIS Bali Tingkat Provinsi;
 - y. Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan PAKIS Bali;
 - z. Sosialisasi Buku Pacalang Bali;
 - aa. Publikasi *Pacalang* Bali melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online;
 - bb. Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan Pacalang Bali;
 - cc. Sosialisasi *Yowana* Bali;
 - dd. Publikasi *Yowana* Bali melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online; dan
 - ee. Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan *Yowana* Bali.
2. Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat, difokuskan pada :
- a. Desiminasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali beserta turunannya melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online;
 - b. Pendampingan Penyuratan *Awig-Awig* dan *Pararem*;
 - c. Sosialisasi Pedoman Teknis Penyuratan *Awig-Awig* dan *Pararem*;
 - d. *Registrasi Awig-Awig dan Pararem* Desa Adat;
 - e. Pemantapan penyempurnaan Aplikasi JIDHAT (Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat);
 - f. Sosialisasi/Desiminasi Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara* Adat;
 - g. Memfasilitasi penyelesaian *Wicara* Adat;
 - h. Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat;
 - i. Memantapkan Pelaksanaan Kesepakatan Tentang Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDUBERADAT);
 - j. Peningkatan Kapasitas Forum SIPANDUBERADAT di Desa Adat;
 - k. Peningkatan Kapasitas Forum SIPANDUBERADAT tingkat Provinsi, Kab/Kota, dan Kecamatan; dan
 - l. Publikasi SIPANDUBERADAT melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online.
- B. Kerangka pendanaan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat, melalui:
1. Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat, difokuskan pada:
- a. Penyusunan draft Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang *Labda Pacingkreman* Desa Adat (LPD)
 - b. Sosialisasi Perda *Labda Pacingkreman* Desa Adat (LPD)
 - c. Sosialisasi Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda *Labda Pacingkreman* Desa Adat (LPD)
 - d. Bimtek Peningkatan Kapasitas *Panureksa* LPD Kabupaten/Kota
 - e. Monev dan pendataan LPD
2. Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat, difokuskan pada:
- a. Pendataan Desa Adat yang sudah membentuk sektor riil;
 - b. Sosialisasi Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUPDA;
 - c. Fasilitasi pembentukan BUPDA di Desa Adat di Kab/Kota se-Bali;
 - d. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelolaan BUPDA;
 - e. Pembuatan Sistem Tata Kelola BUPDA Desa Adat Berbasis Aplikasi;
 - f. Diseminasi Pedoman Teknis Kerjasama Perekonomian Desa Adat;

- g. Fasilitas Pengembangan Kerjasama Perekonomian Desa Adat; dan
 - h. Monitoring dan Pendataan Kerjasama Perekonomian Desa Adat.
- C. Kerangka pendanaan Penyelenggaraan Desa Adat, melalui:
- 1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan, difokuskan pada:
 - a. Desiminasi Pergub 25 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan kepada pengelola Daya Tarik Wisata dan Pelaku Pariwisata di 9 Kab/Kota di Bali serta *Bandesa* Madya Kab/Kota melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online;
 - b. Pemutakhiran dan Sosialisasi Data Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan Umat Hindu;
 - c. Sosialisasi dan Desiminasi Rujukan Pemanfaatan *Wewidangan* Desa Adat;
 - d. Penetapan *pilot project* dan Pendampingan Pemanfaatan *Wewidangan* Desa Adat;
 - e. Penyusunan Juknis Perencanaan Pembangunan Desa Adat tahun 2024;
 - f. Sosialisasi Juknis Perencanaan Pembangunan Desa Adat Tahun 2024;
 - g. Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat Tahun 2024;
 - h. Pemutahiran data dan informasi potensi Desa Adat;
 - i. Pemutakhiran Data *Subak* dan *Subak Abian*;
 - j. Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab/Kota dan Desa untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun 2024;
 - k. *Sosialisasi* Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab/Kota dan Desa untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun 2024; dan
 - l. Verifikasi usulan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) *Subak* dan *Subak Abian* Tahun 2024.

Pada Rancangan Renja tahun 2024 dirancang kerangka pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 482.218.721.241,- (empat ratus delapan puluh dua miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) yang dirinci sesuai dengan program sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan 6 (enam) Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp.13.912.808.617 (Tiga belas miliar Sembilan ratus dua belas juta delapan ratus delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- 2. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali dengan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp.468.305.912.624 (Empat ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus lima juta Sembilan ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Rencana kerja dan kerangka pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 secara rinci dituangkan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								482.218.721.241		494.435.831.060			
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								482.218.721.241		494.435.831.060			
2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI								468.305.912.624		477.289.581.060			
2	22	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat								467.480.253.764		475.589.581.060			
2	22	09	8.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	600 Desa	81,71	467.167.556.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,8050	474.714.581.060
2	22	09	8.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	300 Dokumen	81,71	312.697.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,8050	875.000.000
2	22	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat								525.395.276		1.050.000.000			
2	22	09	8.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	200 Desa	10,05	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,8050	450.000.000

2	22	09	8.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	50 Desa	10,05	375.395.276	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,8050	600.000.000
2	22	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat								300.263.584					650.000.000
2	22	09	8.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,7090	4 Laporan	81,38	300.263.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,8050	650.000.000
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								13.912.808.617					17.546.250.000
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								23.224.800					37.000.000
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,80	6 Dokumen	100%	18.160.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0,8050	26.000.000
2	22	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,80	1 Laporan	100%	5.064.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0,8050	11.000.000
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.875.000.785					11.500.000.000
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Denpasar	80,80	52 Orang/ Bulan	100%	10.875.000.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0,8050	11.500.000.000

2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									580.682.900					659.250.000
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,80	1 Paket	100%	6.432.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	6.750.000	
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,80	1 Paket	100%	34.303.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	35.500.000	
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,80	720 Dokumen	100%	16.438.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	17.000.000	
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,80	125 Laporan	100%	523.508.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	600.000.000	
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									95.918.000					1.300.000.000
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik	Denpasar	80,80	15 Unit	0,00	95.918.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	1.300.000.000,00	

2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								305.778.300					350.000.000
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	80,80	36 Laporan	100%	305.778.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	350.000.000
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.032.203.832					3.700.000.000
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Denpasar	80,80	6 Unit	100%	603.139.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	900.000.000
2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Denpasar	80,80	12 Unit	100%	1.429.064.056	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	2.800.000.000
TOTAL													482.218.721.241					494.835.831.060

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2024 mengacu pada Rancangan RKPD Provinsi Bali tahun 2024, serta Agenda Pembangunan Nasional dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan berpengaruh terhadap Bidang Prioritas Pembangunan Bali, khususnya Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya.

Penyusunan program dan kegiatan serta pengusulan kebutuhan dana / pagu indikatif mengacu pada target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang diukur berdasarkan indikator - indikator sasaran yang menjadi IKU dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Apabila usulan kegiatan dan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini akan berimplikasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi, sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dokumen Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 ini diupayakan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah - kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban menjaga konsistensi antara Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024;
2. Dokumen Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2024 ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam RKA .
3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renja 2024, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renja 2024.

Pada Rancangan Akhir Renja tahun 2024 dirancang kerangka pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana / pagu indikatif sebesar Rp. 482.218.721.241,- (Empat ratus delapan puluh dua miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya adalah sebagai salah satu upaya dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan dalam upaya mempercepat terwujudnya *kasukretan* Desa Adat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan strategis yang terarah dan didukung oleh lingkungan yang kondusif, maka pembangunan dapat dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan demi terwujudnya *kasukretan* Desa Adat yang berkualitas.

Bali, 4 Agustus 2023

KEPALA DINAS,



I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012



පිළිගිණු උපාධිකාරී තනි

PEMERINTAH PROVINSI BALI

සමාජ විප්ලවයේ ප්‍රගතිමත් ආයතන

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

තනතුරු පුහුණුව සහ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රවර්ධන - තනි (පරිපාලන) උපායමාර්ග (පරිපාලන) අංශය
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja);
- c. bahwa untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan dan penganggaran pembangunan perlu adanya koordinasi antar unit kerja di lingkungan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024;
 - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali

Pada tanggal 06 Januari 2023

KEPALA DINAS,



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA

NIP. 19680613 199403 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS
PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2024

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
Ketua	: Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
Sekretaris	: I Nyoman Suparwa, SE, Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
Anggota	: 1. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; 2. Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; 3. Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; 4. Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; 6. Kadek Doni Raditya, SSTP, M.SI Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; 7. I Putu Andhika Putra, S.STP Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; 8. Ida Bagus Alit Dharmaja, SE Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; 9. I Gusti Agung Putra, S.SOS, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; 10. I Made Suadi, S.SOS, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;

11. I Nyoman Bagus Mataram Putra, SH. M.Si, Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
12. Ni Made Sristiati, S.Sos, Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
13. I Gede Adi Wijaya Asa, S.Sos, MAP, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
14. I Nyoman Sugiarta, S.Sos, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
15. Suadnyani Tuti Indrajani, SSTP, M.Si Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

KEPALA DINAS,



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Bali sebagai laporan
2. Wakil Gubernur Bali di Bali sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali sebagai laporan